



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR	V
KATA PENGANTAR.....	V
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	2
C. Isu-isu Strategis	5
D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	5
E. Sistematika Penulisan	9
F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	10
BAB II <u>P</u> ERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	31
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	37
BAB III <u>A</u> KUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
B. Realisasi Anggaran.....	91
C. Inovasi	94
D. Penghargaan	97
BAB IV <u>P</u> ENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Rekomendasi.....	101
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.3 : Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi	7
Tabel 1.4 : Perbandingan Anggaran tahun 2024 dan 2025.....	8
Tabel 1.5 :indak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	9
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal berdasarkan Renstra 2021-2026.....	14
Tabel 2.2 : Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal berdasarkan Renstra 2025-2029.....	18
Tabel 2.3 : Tabel Strategi dan Kebijakan	25
Tabel 2.4 : Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2021-2026).....	31
Tabel 2.5 : Tabel Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 (Renstra 2025-2029).....	32
Tabel 2.6 : Tabel Program dan Kegiatan.....	33
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja DPUPR Kabupaten Kendal Tahun 2025 Renstra 2021- 2026.....	38
Tabel 3.2 : Hasil Evaluasi atas SAKIP Tahun 2023 dan 2024.....	41
Tabel 3.3 : Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi.....	41
Tabel 3.4 : Kondisi Drainase Kabupaten Kendal.....	42
Tabel 3.5 : Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kendal.....	43
Tabel 3.6 : Capaian Kinerja DPUPR Kabupaten Kendal Tahun 2025 Renstra 2025-2029.....	47
Tabel 3.7 : Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi untuk Kinerja Renstra 2021-2026.....	51

Tabel 3.8	: Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi untuk Kinerja Renstra 2025-2029.....	53
Tabel 3.9	: Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun Terakhir untuk Renstra 2021-2026.....	55
Tabel 3.10	: Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun Terakhir untuk Renstra 2025-2029.....	57
Tabel 3.11	: Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD 2021-2026.....	59
Tabel 3.12	: Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD 2025-2029.....	61
Tabel 3.13	: Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan untuk Renstra 2021-2026.....	62
Tabel 3.14	: Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan untuk Renstra 2025-2029.....	66
Tabel 3.15	: Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Renstra 2021-2026.....	69
Tabel 3.16	: Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Renstra 2025-2029.....	73
Tabel 3.17	: Tabel Analisis Program/Kegiatan untuk Renstra 2021-2026.....	75
Tabel 3.18	: Tabel Analisis Program/Kegiatan untuk Renstra 2025-2029.....	83
Tabel 3.19	: Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Peta Proses Bisnis DPUPR	3
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi DPUPR.....	4
Gambar 2.1 : Aplikasi E-SAKIP.....	37
Gambar 2.2 : Aplikasi SIEVA	37
Gambar 3.1 : Layanan Status Permohonan PBG	94
Gambar 3.2 : Tampilan SIPPINTAR	95
Gambar 3.3 : Tampilan SIDAI	96
Gambar 3.4 : Lomba Kinerja Petugas OP Jaringan Irigasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Kategori Kemantren/Juru	97
Gambar 3.5 : Penghargaan Kabupaten/Kota Terbaik Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi TA. 2023	97

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor : 600.1/498/DPUPR tanggal 21 Februari 2025.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Kendal,

2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kendal



SUDARYANTO, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197007151999031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN menekankan pada perencanaan kinerja yang terukur, pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, serta evaluasi capaian kinerja berbasis indikator yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, termasuk keberhasilan, kendala, serta langkah perbaikan yang dilakukan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan daerah dan masyarakat, LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LkjiP ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Mandat Kinerja

Sebagai instansi pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan.

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tata ruang.

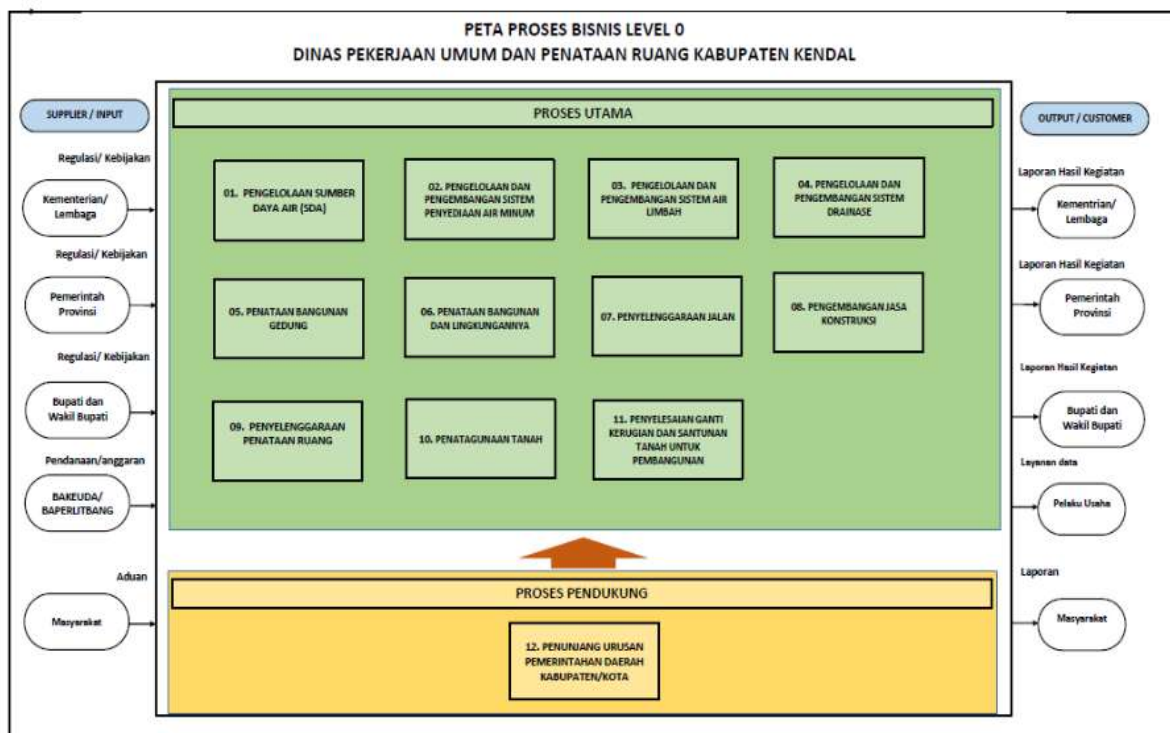
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Peta Proses Bisnis

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Gambar 1.1
Peta Proses Bisnis DPUPR



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Struktur Organisasi

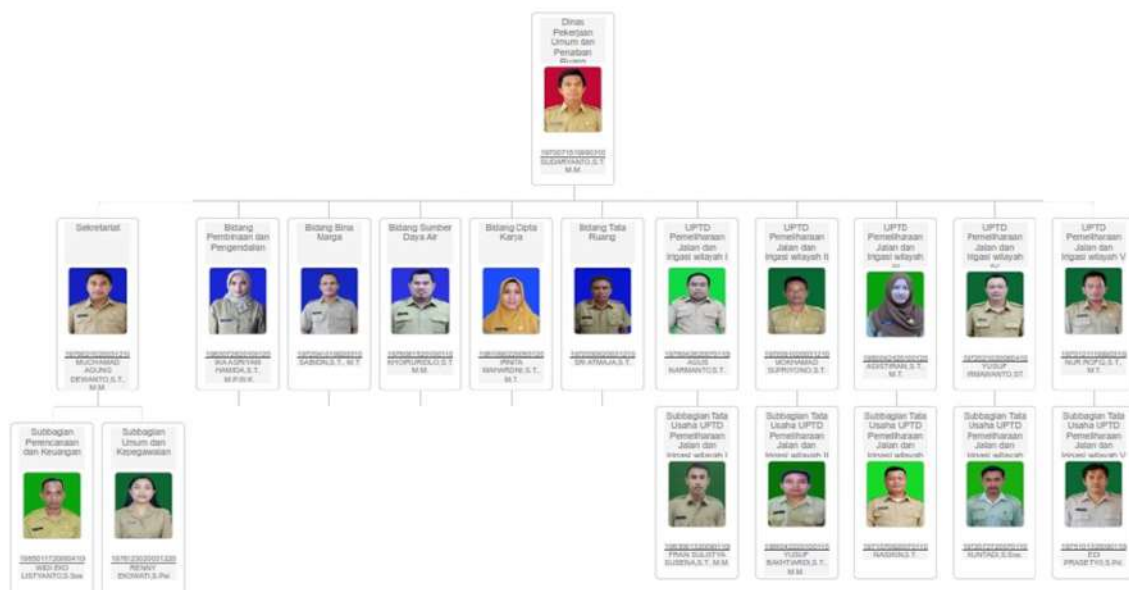
Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahkan :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Bidang Pembinaan dan Pengendalian, yang membawahkan :

- a. Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Ketua Tim Pengendalian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - c. Ketua Tim Peralatan.
4. Bidang Bina Marga, yang membawahkan :
 - a. Ketua Tim Survey dan Perencanaan Bina Marga;
 - b. Ketua Tim Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Ketua Tim Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahkan :
 - a. Ketua Tim Pembangunan Jaringan Irigasi dan Sungai; dan
 - b. Ketua Tim Operasi Pemeliharaan Irigasi dan Konservasi Sumber Daya Air.
6. Bidang Cipta Karya, yang membawahkan:
 - a. Ketua Tim Survey dan Perencanaan Cipta Karya;
 - b. Ketua Tim Bangunan Gedung; dan
 - c. Ketua Tim Penyehatan Lingkungan.
7. Bidang Tata Ruang, yang membawahkan :
 - a. Ketua Tim Survey dan Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Ketua Tim Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketua Tim Pertanahan.

Berikut bagan Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal:

Gambar 1.2
Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Kendal



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

C. Isu-isu Strategis

Berkaitan dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, isu-isu yang mendapatkan prioritas dan harus segera diselesaikan adalah sebagai berikut

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pengelolaan Infrastruktur daerah;
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemenuhan standar pelayanan minimal pekerjaan umum;
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan

Isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tidak bias lepas dari arah kebijakan pembangunan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah prioritas pembangunan setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran disetiap misi. Berikut adalah arah kebijakan Kabupaten Kendal:

- a. Kabupaten Kendal memiliki arah kebijakan dengan focus pada aspek pemulihan ekonomi, kesehatan, social dan infrastruktur;
- b. Untuk Tahun 2025 "Kendal Inclusive" arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal di prioritaskan pada "Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkankualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan". Fokus pada kebijakan ini adalah penguatan kualitas jalan pada peningkatan kelas jalan, peningkatan pemeliharaan jalan serta peningkatan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten.

D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus ada di Perangkat Daerah, karena kinerja aparatur akan menentukan tingkat kinerja Perangkat Daerah tersebut. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal terdapat 218 orang Pegawai yang terdiri dari 134 PNS, 11 CPNS dan 73 orang PPPK. Berikut data jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		CPNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	1	0	0	0	22	0	23
2	SMP Sederajat	10	0	0	0	0	0	10
3	SMA Sederajat	61	5	0		28	9	103
4	D3	5	4	5	6	3	5	28
5	D4	1	0	0	0	0	0	1
6	S1	23	9	0	0	3	3	38
7	S2	9	6	0	0	0	0	15
	Jumlah	110	24	5	6	56	17	218

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	PNS	
a.	Golongan I	0
b.	Golongan II	68
c.	Golongan III	58
d.	Golongan IV	8
Jumlah		134
2	CPNS	
a.	Golongan I	0
b.	Golongan II	11
c.	Golongan III	0
Jumlah		11
3.	PPPK	
a.	I	22
b.	V	37
c.	VII	8
d.	IX	6
Jumlah		73
Total		218

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

keadaan bulan Desember 2025 dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah
1	Excavator	unit	2
2	Tandam Roller	unit	20
3	AC	unit	18
4	Alat Penghancur Kertas	unit	4
5	Lemari Besi	unit	24
6	Almari Besi Kaca	unit	1
7	Laptop	unit	125
8	Komputer PC/CPU	unit	41
10	Filling Cabinet	unit	55
11	Blok katrol	unit	2
12	Brankas	unit	6
13	Stamper	unit	12
14	GPS	unit	23
15	Sepeda Motor	unit	153
16	Kendaraan Bermotor roda Tiga	unit	5
17	Kipas Angin	unit	26
18	Drone	unit	1
19	CCTV Unit	unit	1
20	Handy Cam	unit	6
21	Proyektor	unit	9
22	Facsimile	unit	5
23	Finger Print	unit	3
24	Kursi	unit	142
25	Kursi E 3	unit	4
26	Kursi E 4	unit	6
27	Meja Rapat	unit	15
28	Meja Pelayanan	unit	3
29	Meja kerja	unit	56
30	Meja kerja E	unit	4
31	Kamera Digital	unit	10
32	Meja Komputer	unit	8
33	Rak Arsip/besi	unit	78
34	Mobil	unit	25
35	Genset	unit	8
36	Alat Pemadam Kebakaran	unit	12
37	Printer	unit	141
38	Bego Loader	unit	1

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Tabel 1.4
Perbandingan Anggaran tahun 2024 dan 2025

Tahun	Belanja Operasi	Realisasi	Belanja Modal	Realisasi
2024	Rp. 61.336.468.970	Rp. 59.709.390.867	Rp. 75.624.355.269	Rp. 73.206.075.202
2025	Rp. 52.229.422.573	Rp. 49.057.572.941	Rp. 59.322.387.085	Rp. 55.916.776.852

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Laporan keuangan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 jumlah total Rp. 111.551.809.658 Total realisasi keuangan sebesar Rp. 104.974.349.793 Sisa anggaran sebesar Rp. 6.577.459.865, presentase 94,10%.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
5. Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang dianggarkan dan yang telah terealisasi untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel 1.5
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu	Mengunggah dokumen perencanaan dan laporan kinerja pada website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dan website https://esr.menpan.go.id/ tepat waktu
2.	Dalam melaksanakan kegiatan penyesuaian anggaran, agar memprioritaskan pencapaian kinerja pada program/kegiatan yang belum tercapai kinerjanya	Telah dilakukan langkah-langkah strategis berupa evaluasi capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan skala prioritas penyesuaian anggaran, dengan mengarahkan alokasi sumber daya pada program dan kegiatan yang memiliki tingkat capaian kinerja belum optimal namun berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis
3.	Dalam penyusunan rencana program/kegiatan agar menambahkan kegiatan/sub kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang belum tercapai	Telah dirumuskan kegiatan dan/atau subkegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian IKU yang belum optimal
4.	Dalam menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang agar mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	Menyusun Perjanjian Kinerja berjenjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yang mengacu pada ketentuan yang berlaku
5.	Agar menyusun SOP Pengumpulan Data	Menyusun SOP Pengumpulan Data

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
6.	Agar dalam menyusun dokumen Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan/kendala yang dihadapi disajikan secara spesifik, terutama terkait indikator kinerja yang belum tercapai	Menyusun dokumen LKJIP dengan menyajikan informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan/kendala yang dihadapi
7.	Agar menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku	Menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya dan dijadikan pedoman perbaikan kinerja tahun mendatang

Sumber: LHE SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat

Berdasarkan RPJMD 2021-2026, arah kebijakan tahun 2025 di Kabupaten Kendal diprioritaskan pada Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan". Fokus pada kebijakan ini adalah penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi. Penguatan kualitas jalan difokuskan pada peningkatan kelas jalan, peningkatan pemeliharaan jalan serta peningkatan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten. Untuk layanan angkutan jalan yang terintegrasi difokuskan pada peningkatan kualitas terminal terpadu Bahurekso dan peningkatan layanan BST yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih periode tahun 2021-2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

"Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan"

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian misi ke-4 yaitu: **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.**

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah;
2. Meningkatnya cakupan universal access;

Sedangkan untuk tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam RPJMD 2025-2029 adalah

1. Tujuan : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, dengan indikator yaitu : Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum

2. Sasaran Strategis :

- a. Sasaran 1: Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah, dengan indikator: Persentase jalan dalam kondisi mantap;
- b. Sasaran 2: Meningkatkan realisasi rencana induk pembangunan, dengan indikator: Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW;
- c. Sasaran 3: Meningkatkan sistem irigasi yg terintegrasi, dengan indikator: Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
- d. Sasaran 4: Meningkatkan kualitas kesehatan sanitasi daerah, dengan indikator: Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman;
- e. Sasaran 5: Meningkatkan masyarakat yang memiliki akses air minum layak, dengan indikator: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak;
- f. Sasaran 6: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator: Nilai SAKIP.

Adapun gambaran tujuan/sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam waktu lima tahun berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
berdasarkan Renstra 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah		1. Persentase jalan kondisi mantap	%	88,28	89,28	90,78	92,78	94,78	96,78	98,78
	Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	67,03	68,45	69,91	70,58	71,17	71,94	73,11
		Persentase drainase kondisi baik	%	75,13	75,87	76,70	78,15	79,26	80,35	81,39

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	28,94	34,11	47,03	59,95	72,87	85,79	98,71
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	0	0	0	0	0
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pertanahan	Skor nilai SAKIP perangkat daerah	Score	75,21	75,40	75,60	75,80	76,00	76,20	76,40
		2. Persentase luasan daerah irigasi kondisi baik	%	63,94	64,85	66,77	69,55	71,08	73,00	75,45
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta	Persentase infrastruktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	%	40,96	41,11	44,02	44,75	45,48	46,21	46,94

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha									
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	19,14	18,19	17,18	16,21	15,19	14,23	13,83
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	80	80	82	84	86	88	90
	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	%	20	20	18	16	14	12	10

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota	%	54,82	85,29	85,50	86,00	86,50	87,00	88,00
	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	%	42,01	47,21	56,13	65,06	73,98	82,90	100,00
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		Persentase Capaian Universal Acces	%	92,49	93,59	94,29	94,90	95,63	96,30	96,39
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	%	93,35	95,35	96,60	97,64	98,84	100,00	100,00
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	%	91,62	91,82	91,97	92,17	92,41	92,60	92,77

Sumber : Renstra DPUPR Kabupaten Kendal 2021-2026

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
berdasarkan Renstra 2025-2029

URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Target Kinerja Pada tahun Ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	T: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum	%	76,50	76,79	77,08	77,37	77,66	77,95
	S: Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	83,90	84,40	84,90	85,40	85,90	86,40
	S: Meningkatkan realisasi rencana induk pembangunan	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	81,83	82,33	82,83	83,33	83,83	84,33
	S: Meningkatnya sistem irigasi yg terintegrasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks	39,92	39,94	39,96	39,98	40,00	40,02

URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Target Kinerja Pada tahun Ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	S: Meningkatnya kualitas kesehatan sanitasi daerah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	1,00	1,10	1,20	1,30	1,50	2,00
	S: Meningkatnya masyarakat yang memiliki akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	95,70	95,78	95,86	95,94	96,02	96,09
	S: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	76,40	77,16	77,94	78,71	79,50	80,30

Sumber : Renstra DPUPR Kabupaten Kendal 2026-2029

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal periode Renstra 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi

- a. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi melalui:
 - 1) Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi;
 - 2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi;
 - 3) Peningkatan pengelolaan aset dan fasilitas kerjasama daerah dalam pengelolaan SDA;
 - 4) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan air baku;
 - 5) Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku;
 - 6) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana air baku;
 - 7) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai;
 - 8) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana sungai;
 - 9) Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam progam penanggulangan banjir dengan memberdayakan masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jalan dan jembatan melalui:
 - 1) Pembangunan jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat (JKL-4)
 - 2) Rehabilitasi jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat (JKL-4);
 - 3) Pembangunan jalan lokal;
 - 4) Penanganan pelebaran jalan dengan konstruksi beton;
 - 5) Perkuatan tebing jalan;
 - 6) Pelebaran jalan dan jembatan;
 - 7) Peningkatan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir.

- c. Peningkatan kinerja sistem drainase perkotaan melalui:
 - 1) Peningkatan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir
 - 2) Pembangunan jaringan drainase;
 - 3) Peningkatan kualitas jaringan drainase perkotaan;
 - 4) Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - 5) Peningkatan sarana dan prasarana drainase lingkungan dan pengendalian banjir di kawasan perkotaan;
 - 6) Menyusun dokumen perencanaan jaringan drainase.
- d. Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat melalui:
 - 1) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan air minum yang terintegrasi;
 - 2) Sinergitas penyediaan akses air minum antar stakeholder terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, PDAM, dan masyarakat);
 - 3) Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM berbasis masyarakat;
 - 4) Pembangunan baru, peningkatan dan perluasan jaringan SPAM;
 - 5) Operasi, pemeliharaan dan perbaikan SPAM Perpipaan dan Non Perpipaan terlindungi.
- e. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui:
 - 1) Penguatan kapasitas dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan air limbah;
 - 2) Penyusunan dokumen legal formal terkait pengelolaan air limbah domestik;
 - 3) Pembangunan IPLT;
 - 4) Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja;
 - 5) Penyediaan sarana peyedotan tinja;
 - 6) Pelaksanaan program perubahan perilaku masyarakat yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
- f. Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang melalui:

- 1) Penataan kawasan untuk mewujudkan ruang yang inklusif bagi masyarakat;
 - 2) Penyusunan RTBL sebagai penjabaran dari RDTRK dan Kawasan Strategis lainnya;
 - 3) Penegakan RTRW.
- g. Peningkatan tertib penyelenggaraan bangunan gedung melalui:
- 1) Penguatan kapasitas dan kelembagaan pelayanan PBG dan SLF;
 - 2) Sosialisasi dan peningkatan layanan PBG dan SLF;
 - 3) Peningkatan kualitas pembangunan gedung negara sesuai standart;
 - 4) Pendataan, pengendalian dan pengawasan bangunan gedung pemerintah dan swasta.
- h. Peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui:
- 1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja konstruksi;
 - 2) Pengembangan sistem informasi dan publikasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - 3) Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem keselamatan konstruksi, prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi;
 - 4) Peningkatan tertib pengadaan;
 - 5) Peningkatan pengawasan konerja lembaga masyarakat jasa konstruksi.
- i. Meningkatkan kualitas kinerja melalui:
- 1) Peningkatan kapasitas aparatur;
 - 2) Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja yang berkualitas.

2. Kebijakan

- a. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi dengan fokus pada perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi; operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana aringan irigasi dan air baku;perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana

- air baku serta Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai utamanya pada jaringan yang rusak parah terlebih dahulu;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan fokus pada Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat (JKL-4); pembangunan dan rehabilitasi jalan lokal serta pelebaran jembatan;
 - c. Peningkatan kinerja sistem drainase perkotaan dengan fokus pada Pembangunan rehabilitasi jaringan drainase perkotaan;
 - d. Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat dengan fokus pada Sinergitas penyediaan akses air minum antar stakeholder terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, PDAM, dan masyarakat); peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM berbasis masyarakat serta Operasi, pemeliharaan dan perbaikan SPAM Perpipaan dan Non Perpipaan terlindungi terutama di wilayah pedesaan yang rawan kekeringan;
 - e. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan fokus pada pembangunan IPLT; penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja; penyediaan sarana peyedotan tinja dan perubahan perilaku masyarakat yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
 - f. Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan fokus pada Penataan kawasan untuk mewujudkan ruang yang inklusif bagi masyarakat dan Penegakan RTRW;
 - g. Peningkatan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dengan fokus pada penguatan kapasitas dan kelembagaan pelayanan PBG dan SLF serta sosialisasi dan peningkatan layanan PBG dan SLF;
 - h. Peningkatan kualitas jasa konstruksi dengan fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja konstruksi; peningkatan tertib pengadaan serta pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi;
 - i. Peningkatan tertib administrasi pertanahan dengan fokus pada Sosialisasi dan pendampingan administrasi pertanahan serta pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah;

- j. Peningkatan kapasitas aparatur teknis guna menghasilkan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang berkualitas.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Strategi dan kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.3
Tabel Strategi dan Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha	Peningkatan pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi melalui: a. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi; b. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi; c. Peningkatan pengelolaan aset dan fasilitas kerjasama daerah dalam pengelolaan SDA; d. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan air baku; e. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku; f. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana air baku; g. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai; h. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana sungai; i. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam progam penanggulangan banjir dengan memberdayakan masyarakat	Peningkatan pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi dengan fokus pada perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi; operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan air baku; perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku serta Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai utamanya pada jaringan yang rusak parah terlebih dahulu.
2.	Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan jalan dan jembatan melalui: a. Pembangunan jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat (JKL-4);	Peningkatan kualitas penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan fokus pada Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat (JKL-4); pembangunan dan rehabilitasi jalan lokal serta pelebaran jembatan.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		b. Rehabilitasi jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat (JKL-4); c. Pembangunan jalan lokal d. Penanganan pelebaran jalan dengan konstruksi beton; e. Perkuatan tebing jalan; f. Pelebaran jalan dan jembatan; g. Peningkatan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir	
		Peningkatan kinerja sistem drainase perkotaan melalui: a. Pembangunan jaringan drainase; b. Peningkatan kualitas jaringan drainase perkotaan; c. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan; d. Peningkatan sarana dan prasarana drainase lingkungan dan pengendalian banjir di kawasan perkotaan; e. Menyusun dokumen perencanaan jaringan drainase.	Peningkatan kinerja sistem drainase perkotaan dengan fokus pada Pembangunan rehabilitasi jaringan drainase perkotaan
3.	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Peningkatan pemanfaata dan pengendalian tata ruang melalui: a. Penataan kawasan untuk mewujudkan ruang yang inklusif bagi masyarakat; b. Penyusunan RTBL sebagai penjabaran dari RDTRK dan Kawasan Strategis lainnya; c. Penegakan RTRW;	Peningkatan pemanfaata dan pengendalian tata ruang denga fokus pada Penataan kawasan untuk mewujudkan ruang yang inklusif bagi masyarakat dan Penegakan RTRW.
4.	Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Peningkatan tertib penyelenggaran bangunan gedung melalui: a. Penguatan kapasitas dan kelembagaan pelayanan IMB dan SLF;	Peningkatan tertib penyelenggaran bangunan gedung dengan fokus pada penguatan kapasitas dan kelembagaan pelayanan PBG dan SLF serta sosialisasi dan peningkatan layanan PBG dan SLF;

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		b. Sosialisasi dan peningkatan layanan PBG dan SLF; c. Peningkatan kualitas pembangunan gedung negara sesuai standart; d. Pendataan, pengendalian dan pengawasan bangunan gedung pemerintah dan swasta.	
5.	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui: a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja konstruksi; b. Pengembangan sistem informasi dan publikasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi c. Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem keselamatan konstruksi, prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi d. Peningkatan tertib pengadaan. Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi	Peningkatan kualitas jasa konstruksi dengan fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja konstruksi; peningkatan tertib pengadaan serta pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruks
6.	Meningkatnya tertib adminitrasi pertanahan	Peningkatan tertib administrasi pertanahan melalui: 1. Penguatan kapasitas dan kelembagaan pertanahan; 2. Sosialisasi dan pendampingan administrasi pertanahan; 3. Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah; 4. Penyusunan dokumen inventarisasi obyek pertanahan.	Peningkatan tertib administrasi pertanahan dengan fokus pada Sosialisasi dan pendampingan administrasi pertanahan serta pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah;
7.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat melalui: 1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan air minum yang terintegrasi;	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat dengan fokus pada Sinergitas penyediaan akses air minum antar stakeholder terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, PDAM, dan masyarakat);peningkatan kapasitas

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Sinergitas penyediaan akses air minum antar stakeholder terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, PDAM, dan masyarakat); 3. Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM berbasis masyarakat; 4. Pembangunan baru, peningkatan dan perluasan jaringan SPAM 5. Operasi, pemeliharaan dan perbaikan SPAM Perpipaan dan Non Perpipaan terlindungi.	penyelenggara SPAM berbasis masyarakat serta Operasi, pemeliharaan dan perbaikan SPAM Perpipaan dan Non Perpipaan terlindungi terutama di wilayah pedesaan yang rawan kekeringan.
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui 1. Penguatan kapasitas dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan air limbah; 2. Penyusunan dokumen legal formal terkait pengelolaan air limbah domestik; 3. Pembangunan IPLT; 4. Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja; 5. Penyediaan sarana peyedotan tinja; 6. Pelaksanaan program perubahan perilaku masyarakat yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan fokus pada pembangunan IPLT; penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja; penyediaan sarana peyedotan tinja dan perubahan perilaku masyarakat yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
8.	Meningkatnya kompetensi teknis SDM, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan	Meningkatkan kualitas kinerja melalui: a. Peningkatan kapasitas aparatur; b. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja yang berkualitas.	Peningkatan kapasitas aparatur teknis guna menghasilkan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang berkualitas.

Sumber : Renstra DPUPR Kabupaten Kendal 2021-2026

Untuk strategi dan kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal periode Renstra 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi

a. Penurunan Stunting

- 1) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan SPAM perpipaan maupun non perpipaan terlindungi
- 2) Peningkatan terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
- 3) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat

b. Penanganan Kerawanan Pangan

- 1) Peningkatan kapasitas jaringan irigasi, rehabilitasi, dan efisiensi

c. Peningkatan Jalan dan Jembatan Penghubung Antar Kecamatan

- 1) Integrasi jaringan jalan dan jembatan hingga level wilayah terkecil
- 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan serta jembatan sesuai dengan standar
- 3) Optimalisasi terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan
- 4) Pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis daerah untuk mendukung konektivitas kawasan produksi (pertanian, perikanan, industri, pariwisata)
- 5) Peningkatan konektivitas antar wilayah Kabupaten Kendal
- 6) Penyediaan dan peningkatan akses jalan menuju pusat bangkitan perekonomian

d. Revitalisasi Infrastruktur Perkotaan

- 1) Sinkronisasi penyelenggaraan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang

e. Penanganan Banjir Lokal, Rob serta Kawasan Kumuh

- 1) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
- 2) Pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan
- 3) Peningkatan infrastruktur penanggulangan bencana
- 4) Harmonisasi mekanisme penanganan bencana berbasis komunitas-pemerintah-swasta
- 5) Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman
- 6) Integrasi jaringan drainase perkotaan dengan sistem tata ruang

7) Revitalisasi jaringan drainase perkotaan dan permukiman

f. Penguatan Infrastruktur Sumber Daya Air

- 1) Pengembangan irigasi pertanian untuk peningkatan produktivitas lahan sawah dan hortikultura
- 2) Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak agar distribusi air merata dan efisien
- 3) Pembangunan embung, waduk kecil, dan konservasi sumber air untuk mendukung pertanian dan ketahanan pangan

g. Penataan Ruang dan Kawasan

- 1) Optimalisasi pengelolaan dan penatagunaan tanah sesuai peruntukkan penggunaan

2. Kebijakan

- a. Pemeliharaan jalan dan jembatan secara berkala melalui mekanisme *controlling* yang saling bersinergi.
- b. *Quick response* terhadap jalan serta jembatan yang rusak.
- c. Peningkatan konektivitas jaringan jalan penghubung hingga level desa.
- d. Integrasi dokumen perencanaan dengan aktivitas penyelenggaraan tata ruang secara eksisting.
- e. Fasilitasi penyediaan informasi penataan ruang pada seluruh aspek kewilayahan.
- f. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan ruang.
- g. Peningkatan tenaga terampil bidang konstruksi serta penataan ruang dan wilayah.
- h. Peningkatan inventarisasi dan pengelolaan tanah aset dan non aset.
- i. Rehabilitasi dan modernisasi pembangunan infrastruktur jaringan irigasi.
- j. Integrasi dan harmonisasi infrastruktur jaringan irigasi dengan penataan ruang.
- k. Penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi kelompok pengelola.
- l. Perluasan akses terhadap pelayanan sanitasi yang aman dan layak secara menyeluruh.
- m. Edukasi dan penerapan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).
- n. Penguatan kebijakan dan penerapan regulasi terhadap SPM (Satuan Pelayanan Minimal) sanitasi dan kesehatan lingkungan.

- o. Optimalisasi penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.
- p. Perluasan cakupan pelayanan SPAM berbasis masyarakat.
- q. Peningkatan *maintenance and controlling* terhadap kualitas air dan jaringan SPAM perpipaan dan non perpipaan terlindungi.
- r. Peningkatan kualitas air jaringan perpipaan maupun non perpipaan
- s. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan SPAM perpipaan maupun non perpipaan.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah kesepakatan bersama yang mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan sebagai wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dan pertanahan	Skor nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah	75
2	Meningkatkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	52,80%
		Persentase drainase kondisi baik	63,08%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha	Persentase infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	24,25%
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	15,38%
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	95,62%
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	91,91%
5	Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kabupaten/ kota	54,02%
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	71,81%
7	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	18,67%
8	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	70,73%

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Adapun Rencana Kerja Tahun 2026 berdasarkan Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Tabel Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 (Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum	76,79%
2	Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	84,40%
3	Meningkatkan realisasi rencana induk pembangunan	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	82,33%
4	Meningkatnya sistem irigasi yang terintegrasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39,94
5	Meningkatnya kualitas kesehatan sanitasi daerah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	1,10%
6	Meningkatnya masyarakat yang memiliki akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	95,78%
7	Meningkatnya kompetensi teknis sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Nilai SAKIP	77,16

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Untuk program dan kegiatan penunjang kinerja utama disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Tabel Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	Persen	100 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	24

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kecukupan Sarana Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1 Dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	17
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase irigasi kewenangan kab dalam kondisi baik	Persen	49,91 %
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Persen	26%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	Km	1 Km
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	92,01 %
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) aman	Rumah Tangga	2809 Rumah Tangga

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik (%)	Persen	40,93 %
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem drainase yang dikelola dan dikembangkan	Persen	89,25 %
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	16,67 %
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dokumen	25 Dokumen
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan yang dibangun	Persen	100 %
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota	Kawasan	1 Kawasan
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	53,35 %
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	417,62 Km
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	54,91 %
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi	Pelatihan	1 Pelatihan

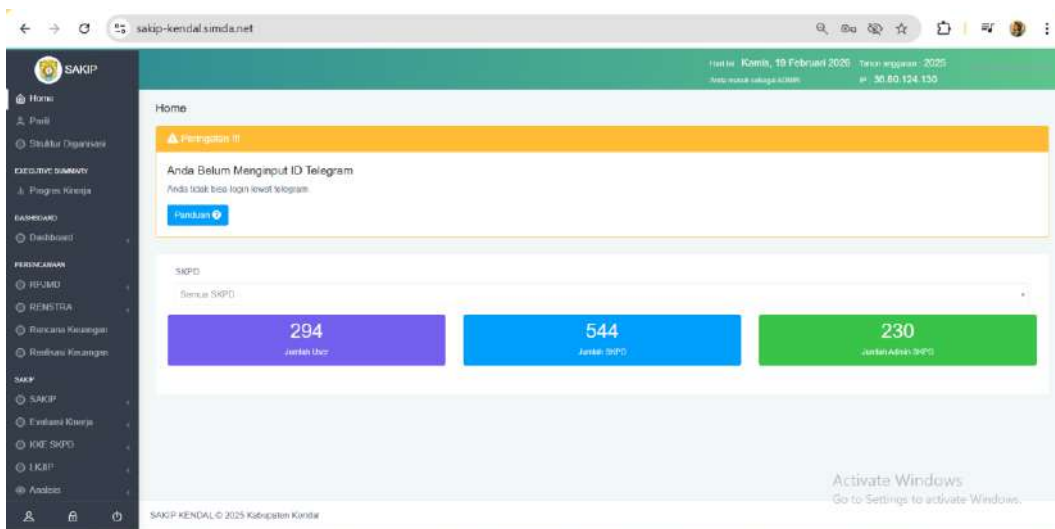
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem	1 Sistem
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Kegiatan	60 Kegiatan
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	Persen	18,17
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan RTRW dan RDTR	Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan RTRW dan RDTR	Dokumen	2 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	Laporan	1 Laporan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Laporan	1 Laporan
10.	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah	Bidang	50 Bidang
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen	1 Dokumen
11.	Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Bidang	43,45 %
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota	Laporan	1 Laporan

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

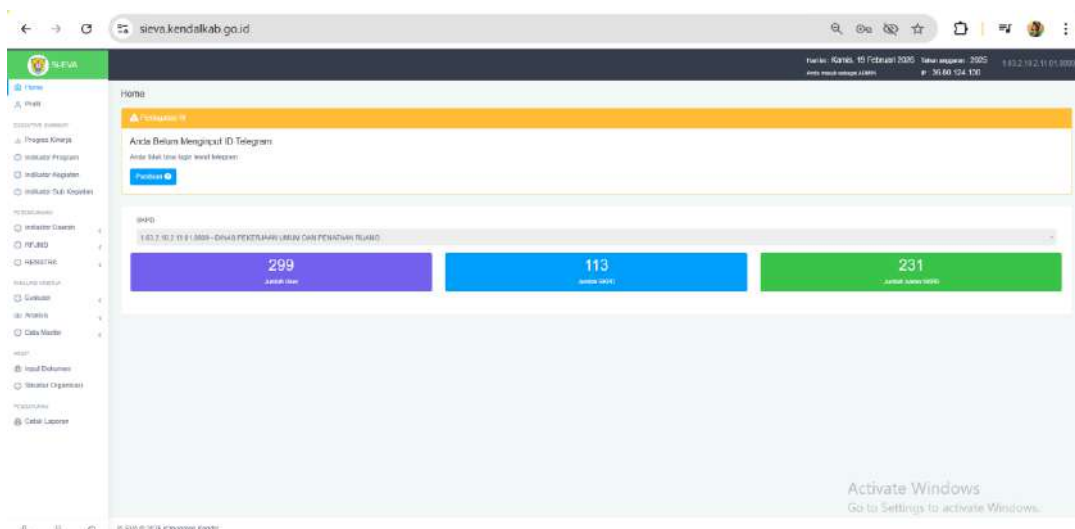
Instrumen pendukung capaian penerapan Sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal adalah aplikasi E-SAKIP <https://sakip-kendal.simda.net/> dan SI EVA <https://sieva.kendalkab.go.id/>.

Gambar 2.1
Aplikasi E-SAKIP



Sumber : <https://sakip-kendal.simda.net/>

Gambar 2.2
Aplikasi SIEVA



Sumber : <https://sieva.kendalkab.go.id/>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas public merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dengan Bapak Bupati Kabupaten Kendal tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

- a. Sangat Baik : >100%
- b. Baik : 85 – 100%
- c. Cukup : 65 – 84,99%
- d. Kurang : 50 – 64,99%
- e. Sangat Kurang : <50%

Tabel 3.1
Capaian Kinerja DPUPR Kabupaten Kendal Tahun 2025 Renstra 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dan pertanahan	Skor nilai SAKIP perangkat daerah	%	75	75,50	100,66	76,40

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
2	Meningkatkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	52,80	55,497	105,10	73,11
		Persentase drainase kondisi baik	%	63,08	63,73	101,03	81,39
3	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha	Persentase infrastruktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	%	24,25	51,45	212,16	46,94
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	15,38	25,98	59,19	13,83
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	%	95,62	95,72	100,10	100
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	%	91,91	92,76	100,92	92,77
5	Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota	%	54,02	84,10	155,68	88

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	71,81	89,24	124,27	98,71
7	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	%	18,67	18,67	100	10
8	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	%	70,37	71,07	100,99	100

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Dari sebelas indikator sasaran strategis yang berdasarkan Renstra 2021-2026 diatas, sepuluh indikator sasaran strategis tingkat ketercapaian melebihi 100%, dan satu indikator sasaran strategis berada dibawah capaian 100%. Berikut adalah analisis capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis diatas :

1. Sasaran strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan dengan indikator : Skor Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 75 dan realisasi sebesar 75,5 (capaian 100,66%). Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini tercermin dari meningkatnya evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan. Selain itu, penyelarasan antara dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja telah dilakukan dengan baik, sehingga mendukung tercapainya hasil yang terukur dan akuntabel akan tetapi kedepan perlu ditingkatkan lagi mengenai ketiga aspek tersebut sehingga skor pada Tahun berikutnya dapat meningkat.

Tabel 3.2
Hasil Evaluasi atas SAKIP Tahun 2023 dan 2024

NO	INDIKATOR	SKOR 2024 (LHE ATAS SAKIP 2023)	SKOR 2025 (LHE ATAS SAKIP 2024)
1	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	24,00	24,00
2	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja	21,00	21,00
3	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja	11,25	11,25
4	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,75	19,25
	TOTAL	75,00	75,50

Sumber : LHE SAKIP 2023 dan 2024,2025

- Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan serta Kinerja Sistem Drainase Perkotaan dengan indikator 1 : Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 55,497% dari target 52,80% (capaian 105,70%). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 056/381/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Kendal, Kabupaten Kendal memiliki Panjang jalan kabupaten sepanjang 782,710 km dengan jumlah ruas sebanyak 272 ruas jalan. Dalam penetapan kondisi jalan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan bahwa jalan dibagi menjadi 4 kondisi yaitu kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat. Dalam hal kondisi jalan baik dan sedang dikategorikan menjadi kondisi jalan mantap dan kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat dikategorikan menjadi kondisi jalan tidak mantap. Berdasarkan hasil survey kondisi jalan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 dapat diketahui kondisi jalan Kabupaten Kendal sebagai berikut :

Tabel 3.3
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi

NO	URAIAN	PROSENTASE	PANJANG (KM)
1	KONDISI MANTAP	83,707%	655,181
	Baik	55,497%	434,381
	Sedang	28,210%	220,800
2	KONDISI TIDAK MANTAP	16,293%	127,529

NO	URAIAN	PROSENTASE	PANJANG (KM)
	Rusak Ringan	8,673%	67,883
	Rusak Berat	7,620%	59,646
	TOTAL	100,00%	782,710

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan jalan dan jembatan telah dilaksanakan secara optimal dan melampaui target yang direncanakan. Peningkatan kondisi jalan tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan rutin maupun berkala jalan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan

Untuk indikator 2 : Persentase drainase kondisi baik mencapai 63,73% dari target 63,08% (capaian 101,03%). Kabupaten Kendal memiliki panjang drainase perkotaan 88.462,8 m dengan panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik sepanjang 56.377,2 m. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan drainase perkotaan telah berfungsi dengan baik dalam mendukung sistem pengendalian air dan meminimalkan potensi genangan. Capaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan peningkatan, rehabilitasi, serta pemeliharaan rutin saluran drainase yang dilakukan secara terencana. Meskipun capaian telah melampaui target, masih terdapat sebagian jaringan drainase yang memerlukan peningkatan kualitas dan penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu, ke depan Pemerintah Daerah akan terus mengoptimalkan kegiatan rehabilitasi saluran, serta peningkatan kapasitas drainase pada titik-titik rawan genangan guna mewujudkan sistem drainase perkotaan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan.

Tabel 3.4
Kondisi Drainase Kabuaten Kendal

No	Status Jalan	Panjang Saluran Eksisting	Baik	Buruk
1	Drainase Jalan Total	88.462,8	56.377,2	32.085,7
	Persentase		63,73%	36,27%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

- Sasaran strategis 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi Primer serta Sekunder dengan indikator 1 : Persentase infrastruktur

daerah irigasi dalam kondisi baik mencapai 51,45% dari target 24,25% (capaian 212,16%). Kondisi daerah irigasi di Kabupaten Kendal dalam kondisi baik seluas 5.365 Ha dengan total luas daerah irigasi di Kabupaten Kendal adalah 10.427 Ha. Pada Tahun 2025 fokus kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan 17 paket pekerjaan fisik dengan output 3,9 km. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi telah berhasil dilaksanakan secara optimal.

Tabel 3.5
Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kendal

No	Kondisi Daerah Irigasi	Luas Kondisi (Ha)	Persentase (%)
1	Kondisi Baik	1.958	18,78
2	Kondisi Rusak Ringan	3.407	32,67
3	Kondisi Rusak Sedang	1.713	16,43
4	Kondisi Rusak Berat	3.349	32,12
Total		10.427	100
Kondisi Baik (Baik + Rusak Ringan)		5.365	51,45
Kondisi Rusak (Rusak Sedang + Rusak Berat)		5.062	48,55

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

indikator 2 : Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota mencapai 25,98% dari target 15,38% (capaian 59,19%). Kondisi ini mengindikasikan adanya beberapa kendala dalam optimalisasi fungsi infrastruktur pengendalian banjir. Beberapa factor penghambat capaian tersebut adalah adanya perubahan pola curah hujan dan peningkatan intensitas hujan ekstrem, yang berdampak pada meluasnya area genangan di beberapa Kawasan terutama pada awal tahun 2025 terjadi bencana banjir besar yang diakibatkan oleh kerusakan tanggul di Kecamatan Patebon dan sekitarnya, serta tingginya tingkat sedimentasi dan penyempitan badan Sungai, yang mana kewenangan Sungai berada pada Pemerintah Provinsi sehingga apabila akan dilakukan perbaikan atau normalisasi Sungai harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi. Beberapa langkah strategis kedepan untuk meningkatkan perlindungan kawasan permukiman terhadap potensi banjir adalah sebagai berikut : Peningkatan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir dan

optimalisasi koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)

4. Sasaran strategis 4 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan indikator 1 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan mencapai 95,72% dari target 95,62% (capaian 100,10%). Target sasaran pelayanan SPAM di Kabupaten Kendal sebanyak 267.339 SR dengan yang sudah mendapatkan akses melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan sebanyak 255.885 SR. Meskipun pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal belum sepenuhnya berkontribusi dalam mencapai target dikarenakan ketidakterersediaan anggaran akan tetapi dalam pemenuhan capaian ini air minum ini ditunjang oleh PDAM yang menyediakan pelayanan pemenuhan air minum di daerah perkotaan.. Upaya kedepannya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian pada tahun yang akan datang adalah mencari sumber pendanaan yang bersumber selain dari APBD yang antara lain dari APBN dan/atau APBD Provinsi, CSR, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta penyertaan modal pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
indikator 2: Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik mencapai 92,76% dari target 91,91% (capaian 100,92%). Target rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik adalah 345.512 KK dengan yang sudah mendapatkan akses air limbah domestik sebanyak 320.487 KK. Pada Tahun 2025 Fokus kegiatan pada pembangunan SPALD Terpusat di 11 Desa dan penyediaan SPALD Setempat di 2 Kelurahan dengan output pekerjaan sebanyak 699 KK. Hal ini menunjukkan peningkatan yang positif terhadap perluasan layanan SPALD.
5. Sasaran strategis 5: Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dengan indikator: Persentase kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota mencapai 84,10% dari target 54,02% (capaian 155,68%). Penerapan kebijakan PBG untuk optimalisasi penyelenggaraan PBG mendorong transformasi sistem PBG yang lebih terintegrasi dan berbasis risiko sehingga meningkatkan kepastian hukum serta mendorong masyarakat untuk mengurus perizinan secara resmi. Selain itu, sinergi yang kuat antara stakeholder yang terlibat

dalam hal ini DPMPTSP, DPUPR, Tim Ahli Bangunan Gedung, Tim Penilai Teknis, dan konsultan perencana menjadi factor pendorong tercapainya indikator tersebut. Pada Tahun 2025 jumlah rekomtek PBG yang masuk sebanyak 516 rekomtek dengan rekomtek yang telah terbit di tahun berjalan adalah 434 rekomtek sehingga tingkat penyelesaiannya sebesar 84,10%. Persentase tersebut konsisten dengan capaian indikator, yang menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan telah diproses dan diterbitkan sesuai ketentuan. Akan tetapi beberapa hal menjadi hambatan dalam penyelesaian penerbitan rekomtek tersebut yaitu banyaknya pengajuan yang dilakukan di akhir tahun sehingga penerbitan rekomtek dilakukan di tahun depan, kelengkapan dokumen dari pemohon yang kurang, serta perbaikan atas catatan dari tim yang tidak segera disampaikan kembali kepada tim.

6. Sasaran strategis 6 : Meningkatnya kualitas jasa konstruksi dengan indikator : Persentase tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi mencapai 89,24% dari target 71,81% (capaian 124,27%). Untuk target jumlah tenaga jasa konstruksi yang akan dilatih selama 5 tahun adalah 660 orang dengan capaian sampai dengan tahun 2025 adalah sebanyak 589 orang yang sudah dilatih sesuai dengan kewenangan kabupaten yaitu untuk jenjang 1 sampai dengan jenjang 6. Hasil ini menunjukkan peningkatan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya minat dari pelaksana jasa konstruksi di Kabupaten Kendal serta beberapa peserta tidak kompeten/tidak hadir pada saat pelaksanaan sertifikasi sedang berlangsung. Upaya yang saat ini dilakukan untuk mencapai target kinerja yaitu dengan bekerja sama dengan SMK N 2 Kendal yang melibatkan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya untuk pelaksanaan sertifikasi siswa SMK. Fasilitas pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja telah berjalan baik dan perlu dilanjutkan agar seluruh tenaga konstruksi memiliki kompetensi standar sesuai amanat pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi dengan salah satu fokusnya adalah memastikan bahwa tenaga kerja konstruksi (TKK) memiliki kompetensi yang diakui secara formal melalui

sertifikasi, agar pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Indonesia memiliki standar mutu, profesionalisme dan daya saing.

7. Sasaran strategis 7: Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan indikator : Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang mencapai 18,67% dari target 18,67% (capaian 100%). Berdasarkan kajian identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang adalah tingkat kesesuaian struktur ruang RTRW Kabupaten Kendal adalah 46,44 (dari nilai maksimal 60). Di beberapa kawasan perkotaan yang masuk ke dalam PKL mengalami ketidaksesuaian fungsinya karena kurangnya jumlah terminal dan stasiun kereta api yang menjadi indikator sebagai simpul utama transportasi skala kabupaten. Pola ruang kawasan lindung Kabupaten Kendal yang masuk dalam katagori sesuai adalah 91,34 %, belum sesuai 8,19 % dan potensi tidak sesuai 0,48%. Pola ruang kawasan budidaya yang sesuai 83,10 %, belum sesuai 16,59 % dan potensi tidak Sesuai 0,31 %. Sehingga secara umum ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang merupakan gabungan dari ketidaksesuaian struktur ruang dan polar uang adalah 18,67%. Dalam hal peningkatan kesesuaian ruang beberapa langkah yang dilakukan pada Tahun 2025 yaitu menyusun Rencana Detail Tata Ruang untuk Kecamatan Cepiring. Saat ini Kabupaten Kendal sudah mempunyai 4 RDTR yaitu RDTR Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Boja dan Kecamatan Patebon. Selanjutnya melakukan percepatan perwujudan struktur ruang baik yang mnejadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Serta melakukan optimalisasi fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang.
8. Sasaran strategis 8 : Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dengan indikator : Persentase tanah Pemda yang bersertifikat mencapai 71,07% dari target 70,37% (capaian 100,99%). Jumlah bidang tanah pemda adalah 2.430 bidang dengan yang sudah bersertifikat sampai dengan Tahun 2025 adalah 1.727 bidang. Pada Tahun 2025 sendiri telah dilaksanakan pensertifikatan tanah pemda sebanyak 17 bidang sertifikat. Capaian ini tergolong baik dan menunjukkan adanya kemajuan dalam penertiban administrasi aset daerah. Namun demikian, masih diperlukan percepatan penyelesaian sertifikasi atas aset yang belum memiliki legalitas agar seluruh aset Pemda terlindungi secara

hukum dengan upaya terus melakukan koordinasi dengan bagian aset dan ATR/BPN.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja DPUPR Kabupaten Kendal Tahun 2025 Renstra 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum	%	76,5	76,959	100,6	77,95
2	Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	83,9	83,707	99,76	86,40
3	Meningkatkan realisasi rencana induk pembangunan	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	81,33	81,33	100	84,33
4	Meningkatnya sistem irigasi yg terintegrasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	39,92	40,08	100,40	40,02
5	Meningkatnya kualitas kesehatan sanitasi daerah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	1,00	1,08	108	2,00
6	Meningkatnya masyarakat yang memiliki akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	95,7	95,72	100,02	96,09
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	%	76,4	75,5	98,82	80,30

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Dari Tujuh indikator tujuan/sasaran strategis yang berdasarkan Renstra 2025-2029 diatas, Lima indikator tujuan/sasaran strategis tingkat ketercapaian sama dengan atau melebihi 100%, dan dua indikator tujuan/sasaran strategis

berada dibawah capaian 100%. Berikut adalah analisis capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis diatas :

1. Tujuan/sasaran strategis 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dengan indikator : Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum dengan target 76,5 dan realisasi sebesar 76,959 (capaian 100,6%). Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum merupakan indikator komposit yang dihitung dari rata-rata tiga indikator kinerja yaitu : Persentase Jalan Mantap (realisasi 83,707%), Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (realisasi 51,45%), dan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak (realisasi 95,72%). Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja yang diukur telah efektif dan stabil, hal ini mencerminkan perencanaan yang realistis dan pengendalian yang baik melalui kegiatan penanganan jalan, air minum yang layak maupun rehabilitasi jaringan irigasi.
2. Tujuan/sasaran strategis 2: Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah dengan indikator: Persentase jalan dalam kondisi mantap mencapai 83,707% dari target 83,90% (capaian 99,76%). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 056/381/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Kendal, Kabupaten Kendal memiliki Panjang jalan kabupaten sepanjang 782,710 km dengan jumlah ruas sebanyak 272 ruas jalan. Dalam penetapan kondisi jalan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan bahwa jalan dibagi menjadi 4 kondisi yaitu kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat. Dalam hal kondisi jalan baik dan sedang dikategorikan menjadi kondisi jalan mantap dan kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat dikategorikan menjadi kondisi jalan tidak mantap. Berdasarkan hasil survey kondisi jalan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 dapat diketahui kondisi jalan Kabupaten Kendal sebagaimana pada tabel 3.3. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan jalan dan jembatan telah dilaksanakan secara optimal melalui peningkatan kondisi jalan yang didukung oleh kegiatan rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan rutin maupun berkala jalan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Akan tetapi realisasi yang telah tercapai belum memenuhi target, hal ini akan menjadi bahan

pertimbangan pada saat perencanaan kedepannya dalam penentuan target yang lebih realistis agar dapat terukur secara tepat.

3. Tujuan/sasaran strategis 3: Meningkatkan realisasi rencana induk pembangunan dengan indikator: Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW mencapai 81,33% dari target 81,33% (capaian 100%). Berdasarkan kajian identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang adalah tingkat kesesuaian struktur ruang RTRW Kabupaten Kendal adalah 46,44 (dari nilai maksimal 60). Di beberapa kawasan perkotaan yang masuk ke dalam PKL mengalami ketidaksesuaian fungsinya karena kurangnya jumlah terminal dan stasiun kereta api yang menjadi indikator sebagai simpul utama transportasi skala kabupaten. Pola ruang kawasan lindung Kabupaten Kendal yang masuk dalam katagori sesuai adalah 91,34 %, belum sesuai 8,19 % dan potensi tidak sesuai 0,48%. Pola ruang kawasan budidaya yang sesuai 83,10 %, belum sesuai 16,59 % dan potensi tidak Sesuai 0,31 %. Sehingga secara umum ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang merupakan gabungan dari ketidaksesuaian struktur ruang dan polar uang adalah 18,67% yang mana kesesuaian tata ruang adalah 81,33%. Dalam hal peningkatan kesesuaian ruang beberapa langkah yang dilakukan pada Tahun 2025 yaitu menyusun Rencana Detail Tata Ruang untuk Kecamatan Cepiring. Saat ini Kabupaten Kendal sudah mempunyai 4 RDTR yaitu RDTR Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Boja dan Kecamatan Patebon. Selanjutnya melakukan percepatan perwujudan struktur ruang baik yang mnejadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Serta melakukan optimalisasi fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang
4. Tujuan/sasaran strategis 4: Meningkatnya sistem irigasi yg terintegrasi dengan indikator: Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota mencapai 40,08 dari target 39,92 (capaian 100,40%). Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kinerja sistem irigasi berdasarkan beberapa aspek penilaian, antara lain:
 - a. Prasarana Fisik (dengan nilai 11,00)
 - b. Produktivitas Tanaman (dengan nilai 8,44)
 - c. Sarana Penunjang (dengan nilai 4,87)
 - d. Organisasi Personalia (dengan nilai 7,29)

- e. Dokumentasi (dengan nilai 3,86)
- f. Kondisi kelembagaan P3A/GP3A/IP3A (dengan nilai (4,62)

Sehingga total Nilai indeks yang diperoleh melalui evaluasi teknis lapangan dan penilaian administratif sesuai pedoman penilaian kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota sebesar 40,08.

5. Tujuan/sasaran strategis 5: Meningkatnya kualitas kesehatan sanitasi daerah dengan indikator: Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman mencapai 1,08% dari target 1,00% (capaian 108%). Target rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestic adalah 345.512 KK dengan yang sudah mendapatkan akses air limbah domestic sebanyak 320.487 KK. Pada Tahun 2025 Fokus kegiatan pada pembangunan SPALD Terpusat di 11 Desa dan penyediaan SPALD Setempat di 2 Kelurahan dengan output pekerjaan sebanyak 699 KK. Hal ini menunjukkan peningkatan yang positif terhadap perluasan layanan SPALD.
6. Tujuan/sasaran strategis 6: Meningkatnya masyarakat yang memiliki akses air minum layak dengan indikator: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak mencapai 95,72% dari target 95,7% (capaian 100,02%). Target sasaran pelayanan SPAM di Kabupaten Kendal sebanyak 267.339 SR dengan yang sudah mendapatkan akses melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan sebanyak 255.885 SR. Meskipun pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal belum sepenuhnya berkontribusi dalam mencapai target dikarenakan ketidaktersediaan anggaran akan tetapi dalam pemenuhan capaian ini air minum ini ditunjang oleh PDAM yang menyediakan pelayanan pemenuhan air minum di daerah perkotaan.. Upaya kedepannya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian pada tahun yang akan datang adalah mencari sumber pendanaan yang bersumber selain dari APBD yang antara lain dari APBN dan/atau APBD Provinsi, CSR, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta penyertaan modal pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Tujuan/sasaran strategis 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator : Nilai SAKIP dengan target 76,4 dan realisasi sebesar 75,5 (capaian 98,82%). Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum dapat memenuhi target yang

direncanakan walaupun terdapat tren peningkatan dari capaian Tahun sebelumnya sebagaimana yang telah tersaji pada tabel 3.2. Hal ini perlu adanya penyelarasan antara dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang baik, sehingga mendukung tercapainya hasil yang terukur dan akuntabel. Upaya yang dilakukan perlu adanya peningkatan mengenai ketiga aspek tersebut sehingga skor pada Tahun berikutnya dapat memenuhi target yang direncanakan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.7
Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi untuk Kinerja Renstra 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dan pertanahan	Skor nilai SAKIP perangkat daerah	75	75,50	100,66	Sangat Baik	Inspektorat Kab. Kendal
2	Meningkatkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	52,80	55,497	105,10	Sangat Baik	DPUPR Kab. Kendal
		Persentase drainase kondisi baik	63,08	63,73	101,03	Sangat Baik	DPUPR Kab. Kendal
3	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha	Persentase infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	24,25	51,45	212,16	Sangat Baik	DPUPR Kab. Kendal
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	15,38	25,98	59,19	Kurang	DPUPR Kab. Kendal

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori	Sumber Data
		pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota					
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	95,62	95,72	100,10	Sangat Baik	DPUPR Kab. Kendal
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	91,91	92,76	100,92	Sangat Baik	DPUPR Kab. Kendal
5	Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota	54,02	84,10	155,68	Sangat Baik	DPUPR Kab. Kendal
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	71,81	89,24	124,27	Sangat Baik	DPUPR Kab. Kendal
7	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	18,67	18,67	100	Baik	DPUPR Kab. Kendal
8	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	70,37	71,07	100,99	Sangat Baik	DPUPR Kab. Kendal

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Tabel 3.8
Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi untuk Kinerja Renstra 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum	76,5	76,959	100,6	Sangat Baik	DPUPR Kab. Kendal
2	Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	83,9	83,707	99,76	Baik	DPUPR Kab. Kendal
3	Meningkatkan realisasi rencana induk pembangunan	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	81,33	81,33	100	Sangat Baik	DPUPR Kab. Kendal
4	Meningkatnya sistem irigasi yg terintegrasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39,92	40,08	100,40	Sangat Baik	DPUPR Kab. Kendal
5	Meningkatnya kualitas kesehatan sanitasi daerah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	1,00	1,08	108	Sangat Baik	DPUPR Kab. Kendal
6	Meningkatnya masyarakat yang memiliki akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	95,7	95,72	100,02	Sangat Baik	DPUPR Kab. Kendal
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	76,4	75,5	98,82	Baik	Inspektorat Kab. Kendal

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Berdasarkan tabel 3.7 perbandingan capaian kinerja pada Renstra 2021-2026, distribusi kategori indikator menunjukkan variasi tingkat pencapaian , sedangkan berdasarkan tabel 3.8 perbandingan capaian kinerja pada Renstra 2025-2029, distribusi kategori indikator hanya menunjukan dua variasi tingkat pencapaian, yaitu Sangat Baik dan Baik. Secara umum, mayoritas indikator berada pada kategori Sangat Baik, yang menunjukkan bahwa sebagian besar

target kinerja telah tercapai sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik dari indikator kinerja yang berdasarkan Renstra 2021-2026 maupun Renstra 2025-2029. Hal ini mengindikasikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan

Adapun indikator dengan kategori Kurang mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara target dan realisasi. Hal ini perlu dilakukan evaluasi mendalam, baik dari sisi perencanaan (penetapan target yang kurang realistis), pelaksanaan (hambatan teknis dan administratif), maupun faktor eksternal yang berada di luar kendali organisasi. Indikator yang memiliki kategori kurang yaitu Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS. Faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam pencapaian target indikator adalah adanya bencana banjir yang cukup besar dampaknya terhadap kerusakan infrastruktur pengendali banjir dan memperluas area kawasan rawan banjir.

Secara keseluruhan, komposisi capaian menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah berjalan cukup efektif, namun tetap diperlukan penguatan pada indikator dengan kategori Kurang tersebut melalui mitigasi awal bencana banjir yang mungkin terjadi di tahun depan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun).

Tabel 3.9
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun Terakhir untuk Renstra 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Tar get	Real isas i	%	Tar get	Real isas i	%	Tar get	Real isas i	%
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dan pertanahan	Skor nilai SAKIP perangkat daerah	75,80	74,15	97,82	76	75	98,68	75	75,50	100,66
2	Meningkatkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	70,58	49,69	70,40	71,17	52,799	74,19	52,80	55,497	105,10
		Persentase drainase kondisi baik	78,15	76,98	98,50	79,26	63,08	79,59	63,08	63,73	101,03
3	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha	Persentase infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	44,75	49,97	106,70	45,48	46,96	103,25	24,25	51,45	212,16
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	16,21	15,01	107,99	15,19	15,38	98,76	15,38	25,98	59,19

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	97,30	95,58	98,23	98,84	95,62	96,74	95,62	95,72	100,10
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	92,17	85,81	94,21	92,41	91,91	99,46	91,91	92,76	100,92
5	Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota	86,00	90,26	104,95	87	54,02	62,09	54,02	84,10	155,68
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	59,95	59,85	99,83	72,87	71,81	98,55	71,81	89,24	124,27
7	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	16,00	16,00	100	14	18,67	74,99	18,67	18,67	100

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%
8	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	65,06	62,67	96,32	73,98	70,37	95,12	70,37	71,07	100,99

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Tabel 3.10
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun Terakhir untuk Renstra 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum	-	-	-	-	-	-	76,5	76,959	100,6
2	Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	92,78	83,113	89,58	94,78	83,758	88,37	83,9	83,707	99,76
3	Meningkatkan realisasi rencana induk pembangunan	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	84	84	100	86	81,33	94,56	81,33	81,33	100
4	Meningkatnya sistem irigasi yg terintegrasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	39,92	40,08	100,40
5	Meningkatnya kualitas kesehatan sanitasi daerah	Rumah Tangga dengan Akses	92,17	85,81	94,21	92,41	91,91	99,46	1,00	1,08	108

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%
		Sanitasi Aman									
6	Meningkatnya masyarakat yang memiliki akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	97,30	95,58	98,23	98,84	95,62	96,74	95,7	95,72	100,02
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75,80	74,15	97,82	76	75	98,68	76,4	75,5	98,82

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Berdasarkan tabel 3.9 dan tabel 3.10 Perbandingan realisasi kinerja tiga tahun terakhir dilakukan untuk melihat kesinambungan pencapaian sasaran strategis dalam kurun waktu 3 Tahun (Renstra 2021–2026) sekaligus sebagai *baseline* awal implementasi Renstra 2025–2029.

1. Tren Capaian pada Akhir Periode Renstra 2021–2026

Dalam tiga tahun terakhir periode Renstra 2021–2026, secara umum capaian kinerja menunjukkan tren yang relatif meningkat dan stabil. Indikator-indikator strategis yang menjadi fokus utama cenderung menunjukkan konsistensi pencapaian, meskipun pada beberapa indikator tertentu masih terjadi fluktuasi akibat faktor eksternal seperti perubahan regulasi, dinamika fiskal daerah, maupun kondisi lapangan (cuaca, bencana, atau keterbatasan teknis). Dapat dilihat dari tabel 3.9 untuk indikator Persentase kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota mengalami fluktuatif capaian, hal ini disebabkan oleh jumlah permohonan yang masuk dan yang berhasil diterbitkan rekomteknya tidak bisa diprediksi di awal.

2. Memasuki periode Renstra 2025–2029

Realisasi kinerja pada tahun awal menunjukkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Terjadi penyesuaian indikator terhadap kebijakan pembangunan terbaru dan arah RPJMD yang baru;
- b. Beberapa indikator mengalami redefinisi atau penyempurnaan metode pengukuran;
- c. Capaian awal periode cenderung berada pada tahap konsolidasi dan adaptasi sistem.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perubahan perencanaan, tren capaian kinerja pada indikator yang sebelumnya ada pada Renstra 2021-2026 tidak mengalami penurunan signifikan.

3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.11
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dan pertanahan	Skor nilai SAKIP perangkat daerah	75,50	76,40	98,82
2	Meningkatkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	55,497%	73,11%	75,90%
		Persentase drainase kondisi baik	63,73%	81,39%	78,30%
3	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta	Persentase infrastruktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	51,45%	46,94%	109,60%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Tingkat Kemajuan
	sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	25,98%	13,83%	53,23%
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	95,72%	100%	95,72%
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	92,76%	92,77%	99,99%
5	Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota	84,10%	88%	95,57%
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	89,24%	98,71%	90,40%
7	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	18,67%	10%	53,56%
8	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	71,07%	100%	71,07%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Tabel 3.12
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum	76,959%	77,95%	98,73%
2	Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	83,707%	86,40%	96,88%
3	Meningkatkan realisasi rencana induk pembangunan	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	81,33%	84,33%	96,44%
4	Meningkatnya sistem irigasi yg terintegrasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40,08	40,02	100,14
5	Meningkatnya kualitas kesehatan sanitasi daerah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	1,08%	2,00%	54%
6	Meningkatnya masyarakat yang memiliki akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	95,72%	96,09%	99,61%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75,5	80,30	94,02

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Berdasarkan tabel 3.11 dan tabel 3.12 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021–2026 maupun RPJMD 2025-2029, bertujuan untuk mengukur tingkat kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah jangka menengah. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator program terhadap target tahunan dan target akhir periode RPJMD.

Secara umum, pada Renstra 2021-2026 realisasi kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator belum dapat mencapai target akhir RPJMD

2021-2026. Akan tetapi pada indikator Persentase infrastruktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik (Renstra 2021-2026) dan indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Renstra 2025-2029) sudah melampaui target akhir RPJMD.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.13
Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan untuk Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	%	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dan pertanahan	Skor nilai SAKIP perangkat daerah	75	75,50	100,66	Implementasi SAKIP pada perangkat daerah sudah cukup baik	Dilakukan perbaikan implementasi sakip sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dari Inspektorat Kabupaten Kendal
2	Meningkatkannya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	52,80	55,497	105,10	Peningkatan kondisi jalan dari pelaksanaan kegiatan rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan rutin maupun berkala jalan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan	Mempertahankan permukaan jalan yang berkondisi mantap dan meningkatkan ruas jalan yang berkondisi rusak
		Persentase drainase kondisi baik	63,08	63,73	101,03	pelaksanaan kegiatan peningkatan,	mengoptimalkan kegiatan rehabilitasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	%	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						rehabilitasi, serta pemeliharaan rutin saluran drainase yang dilakukan secara terencana	saluran, serta peningkatan kapasitas drainase pada titik-titik rawan genangan
3	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha	Persentase infrastruktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	24,25	51,45	212,16	Optimalisasi peningkatan infrastruktur daerah irigasi melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dan OP jaringan irigasi	Mempertahankan kondisi infrastruktur daerah irigasi dalam kondisi baik dan meningkatkan yang masih dalam kondisi rusak dengan kegiatan rehab jaringan irigasi
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	15,38	25,98	59,19	Pada tahun 2025 terjadi banjir besar di beberapa wilayah Kabupaten Kendal khususnya di Kecamatan Patebon dan sekitarnya	rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai dan tanggap dalam penanganan bencana banjir
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	95,62	95,72	100,10	Pemenuhan akses air minum Perkotaan melalui jaringan perpipaan yang di layani oleh PDAM	Pengupayaan agar mendapatkan dana yang bersumber selain dari APBD yang antara lain dari APBN dan/atau APBD Provinsi, CSR,

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	%	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		dan bukan jaringan perpipaan					Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta penyertaan modal pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	91,91	92,76	100,92	Adanya pembangunan SPALD Terpusat di 11 Desa dan penyediaan SPALD Setempat di 2 Kelurahan dengan output pekerjaan sebanyak 699 KK	Kajian pembangunan IPLT guna pemenuhan capaian akses air limbah aman
5	Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota	54,02	84,10	155,68	sinergi yang kuat antara stakeholder yang terlibat dalam hal ini DPMPSTSP, DPUPR, Tim Ahli Bangunan Gedung, Tim Penilai Teknis, dan konsultan perencanaan	Sosialisasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum serta keamanan bangunan.
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki	71,81	89,24	124,27	bekerja sama dengan SMK N 2 Kendal yang melibatkan Balai Jasa Konstruksi	Terus dilaksanakan percepatan sertifikasi kompetensi bagi tenaga konstruksi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	%	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		sertifikat kompetensi				Wilayah IV Surabaya untuk pelaksanaan sertifikasi siswa SMK	dengan berkoordinasi dengan Balai Jasa Konstruksi dan menuntut komitmen dari masing-masing peserta agar hadir saat pelaksanaan sertifikasi
7	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	18,67	18,67	100	Telah dilakukan review berkala kesesuaian ruang yang berdasarkan dengan RTRW	Melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pemanfaatan ruang, evaluasi penyempurnaan regulasi terkait RTRW dan sosialisasi kepada masyarakat.
8	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	70,37	71,07	100,99	Penelusuran dokumen aset tanah Pemda dan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti BPKAD, dan ATR/BPN perihal pensertifikatan tanah pemda	Terus melakukan koordinasi dengan BPKAD Bagian Aset dan ATR/BPN

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Tabel 3.14
Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan untuk Renstra 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum	76,5	76,959	100,6	Optimalisasi kegiatan penanganan jalan, air minum yang layak maupun rehabilitasi jaringan irigasi	berfokus pada pendekatan preventif (preservasi), korektif (rehabilitasi/rekonstruksi), dan pengembangan (peningkatan kapasitas layanan)
2	Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	83,9	83,707	99,76	pelaksanaan kegiatan peningkatan, rehabilitasi, serta pemeliharaan rutin saluran drainase yang dilakukan secara terencana	mengoptimalkan kegiatan rehabilitasi saluran, serta peningkatan kapasitas drainase pada titik-titik rawan genangan
3	Meningkatkan realisasi rencana induk pembangunan	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	81,33	81,33	100	Telah dilakukan review berkala kesesuaian ruang yang berdasarkan dengan RTRW	Melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pemanfaatan ruang, evaluasi penyempurnaan regulasi terkait RTRW dan sosialisasi kepada masyarakat.
4	Meningkatnya sistem irigasi yg terintegrasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39,92	40,08	100,40	Optimalisasi semua aspek penilaian dalam IKSI seperti, prasarana fisik, produktivitas, sarana	Upaya peningkatan aspek penilaian IKSI dengan melibatkan stakeholder terkait.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						penunjang, organisasi, dokumentasi dan kelembagaan P3A	
5	Meningkatnya kualitas kesehatan sanitasi daerah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	1,00	1,08	108	Adanya pembangunan SPALD Terpusat di 11 Desa dan penyediaan SPALD Setempat di 2 Kelurahan dengan output pekerjaan sebanyak 699 KK	Kajian pembangunan IPLT guna pemenuhan capaian akses air limbah aman
6	Meningkatnya masyarakat yang memiliki akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	95,7	95,72	100,02	Pemenuhan akses air minum Perkotaan melalui jaringan perpipaan yang di layani oleh PDAM	Pengupayaan agar mendapatkan dana yang bersumber selain dari APBD yang antara lain dari APBN dan/atau APBD Provinsi, CSR, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta penyertaan modal pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	76,4	75,5	98,82	Implementasi SAKIP pada perangkat daerah belum maksimal,	Dilakukan perbaikan implementasi sakip sesuai dengan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Perangkat Daerah					dan kurangnya evien/bukti dukung dalam penilaian SAKIP	rekomendasi yang diberikan dari Inspektorat Kabupaten Kendal

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3.15
Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Targ et	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dan pertanahan	Skor nilai SAKIP perangkat daerah	75	75,50	100,66	Rp23.700.903.255,00	Rp22.535.816.106,00	95,08	4,92
2	Meningkatkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	52,80	55,497	105,10	Rp67.394.538.881,00	Rp63.055.052.288,00	93,56	6,44
		Persentase drainase kondisi baik	63,08	63,73	101,03	Rp1.047.029.496,00	Rp965.614.582,00	92,22	7,78
3	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha	Persentase infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	24,25	51,45	212,16	Rp5.399.698.008,00	Rp5.121.863.473,00	94,85	5,15
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	15,38	25,98	59,19	Rp2.830.988.800,00	Rp2.628.769.487,00	92,86	7,14

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Targ et	Reali sasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
		di WS Kewenangan Kabupaten/Kota							
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	95,62	95,72	100,10	-	-	-	-
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	91,91	92,76	100,92	Rp7.932.302.368,00	Rp7.836.635.930,00	98,79	1,21
5	Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota	54,02	84,10	155,68	Rp2.095.741.250,00	Rp1.910.401.771,00	91,16	8,84
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	71,81	89,24	124,27	Rp226.219.800,00	Rp189.500.306,00	83,77	16,23
7	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	18,67	18,67	100	Rp747.931.500,00	Rp702.613.124,00	93,94	6,06

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Targ et	Reali sasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
8	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	70,37	71,07	100,99	Rp176.456.300,00	Rp28.082.726,00	15,91	84,09

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Berdasarkan tabel 3.15 dapat disimpulkan bahwa:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Renstra 2021–2026

Pada periode Renstra 2021–2026, efisiensi diukur melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja (output/outcome). Secara umum, terdapat beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. **Rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran relatif optimal**, di mana sebagian besar indikator mencapai target dengan tingkat serapan anggaran yang proporsional.
- b. Pada beberapa indikator, capaian indikator melebihi target meskipun realisasi anggaran tidak mencapai 100%, yang menunjukkan adanya efisiensi teknis dalam pelaksanaan kegiatan kecuali pada indikator Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang belum mencapai target.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada Renstra 2021–2026 menunjukkan tren yang semakin membaik seiring meningkatnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja.

Tabel 3. 16
Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Renstra 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum	76,5	76,959	100,6	Rp72.794.236.889,00	Rp68.176.915.761,00	93,66	6,34
2	Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	83,9	83,707	99,76	Rp67.394.538.881,00	Rp63.055.052.288,00	93,56	6,44
3	Meningkatkan realisasi rencana induk pembangunan	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	81,33	81,33	100	Rp3.246.348.850,00	Rp2.830.597.927,00	87,19	12,81
4	Meningkatnya sistem irigasi yg terintegrasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39,92	40,08	100,40	Rp9.277.716.304,00	Rp8.716.247.542,00	93,95	6,05
5	Meningkatnya kualitas kesehatan sanitasi daerah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	1,00	1,08	108	Rp7.932.302.368,00	Rp7.836.635.930,00	98,79	1,21
6	Meningkatnya masyarakat yang memiliki akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	95,7	95,72	100,02	-	-	-	-
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	76,4	75,5	98,82	Rp23.700.903.255,00	Rp22.535.816.106,00	95,08	4,92

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Berdasarkan tabel 3.16 dapat disimpulkan bahwa:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Renstra 2025–2029

Pada periode Renstra 2025–2029, efisiensi diukur melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja (output/outcome). Secara umum, terdapat beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. **Rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran relatif optimal**, di mana sebagian besar indikator mencapai target dengan tingkat serapan anggaran yang proporsional.
- b. Pada beberapa indikator, capaian indikator melebihi target meskipun realisasi anggaran tidak mencapai 100%, yang menunjukkan adanya efisiensi teknis dalam pelaksanaan kegiatan kecuali pada indikator Nilai SAKIP dan Persentase jalan dalam kondisi mantap yang belum mencapai target.
- c. Untuk indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat dihitung dikarenakan pada Tahun 2025 tidak ada alokasi anggaran untuk program penyediaan air minum.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada Renstra 2025–2029 menunjukkan tren yang semakin membaik seiring meningkatnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.17
Tabel Analisis Program/Kegiatan untuk Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dan pertanahan	Skor nilai SAKIP perangkat daerah	100,66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kecukupan Sarana Administrasi Kepegawaian	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
2	Meningkatkannya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	105,10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	104,02	Menunjang
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	104,01	Menunjang
		Persentase drainase kondisi baik	101,03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik (%)	155,70	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem drainase yang dikelola dan dikembangkan	112,04	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
3	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha	Persentase infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	212,16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase irigasi kewenangan kab dalam kondisi baik	103,08	Menunjang
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	59,19	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	100,07	Menunjang
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	420	Menunjang
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan	100,10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap	-	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
	pengolahan air limbah domestik	bukan jaringan perpipaan			jumlah penduduk di kabupaten/kota		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	-	Menunjang
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	100,92	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	100,81	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) aman	133,07	Menunjang
5	Meningkatnya tertib	Persentase kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota	155,68	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	504,49	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
	penyelenggaraan bangunan gedung						
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1736	Menunjang
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan yang dibangun	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	124,27	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	116,08	Menunjang
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi	200	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	128,33	Menunjang
7	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	100	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	97,32	Menunjang
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan RTRW dan RDTR	100	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan RTRW dan RDTR	100	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	100	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<u>Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan penataan ruang</u>	100	Menunjang
8	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	100,99	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	34	Menunjang
				Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota	100	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	100	Menunjang
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	100	Menunjang

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Tabel 3.18
Tabel Analisis Program/Kegiatan untuk Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum	100,6				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	98,82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kecukupan Sarana Administrasi Kepegawaian	100	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
3	Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	99,76	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	104,02	Menunjang
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	104,01	Menunjang
4	Meningkatnya sistem irigasi yg terintegrasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100,40	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase irigasi kewenangan kab dalam kondisi baik	103,08	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	100,07	Menunjang
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	420	Menunjang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik (%)	155,70	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem drainase yang dikelola dan dikembangkan	112,04	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
5	Meningkatnya masyarakat yang memiliki akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	100,02	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	-	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	-	Menunjang
6	Meningkatnya kualitas kesehatan sanitasi daerah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	108	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	100,81	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) aman	133,07	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
7	Meningkatkan realisasi rencana induk pembangunan	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	100	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	504,49	Menunjang
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1736	Menunjang
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan yang dibangun	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	116,08	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi	200	Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	128,33	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	97,32	Menunjang
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan RTRW dan RDTR	100	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan RTRW dan RDTR	100	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	100	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<u>Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan penataan ruang</u>	100	Menunjang
				Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	34	Menunjang
				Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota	100	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	100	Menunjang
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	100	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3. 19
Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.700.903.255	22.535.816.106	95,08%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.534.000	231.784.740	92,52%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.991.754.247	18.476.926.185	97,29%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	88.499.900	88,50%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.281.190.708	1.028.632.044	80,29%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.175.000	158.894.206	79,78%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.535.583.100	1.346.837.212	87,71%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.342.666.200	1.204.241.819	89,69%
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.230.686.808	7.750.632.960	94,17%
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.830.988.800	2.628.769.487	92,86%
2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.399.698.008	5.121.863.473	94,85%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.932.302.368	7.836.635.930	98,79%
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.932.302.368	7.836.635.930	98,79%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.047.029.496	965.614.582	92,22%
4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.047.029.496	965.614.582	92,22%
5.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.880.741.250	1.701.158.771	90,45%
5.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.880.741.250	1.701.158.771	90,45%
6.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	215.000.000	209.243.000	97,32%
6.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	215.000.000	209.243.000	97,32%
7.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	67.394.538.881	63.055.052.288	93,56%
7.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	67.394.538.881	63.055.052.288	93,56%
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	226.219.800	189.500.306	83,77%
8.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	104.350.000	76.479.500	73,29%
8.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	90.980.000	82.263.726	90,42%
8.3	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30.889.800	30.757.080	99,57%
9.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	747.931.500	702.613.124	93,94%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
9.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	247.469.000	231.814.300	93,67%
9.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	245.062.500	237.629.874	96,97%
9.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	180.400.000	173.395.300	96,12%
9.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	59.773.650	79,70%
10.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	37.606.300	1.641.100	4,36%
10.1	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.606.300	1.641.100	4,36%
11.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	138.850.000	26.441.626	19,04%
11.1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	138.850.000	26.441.626	19,04%
Total		111.551.809.658	104.974.349.793	94,10%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2025

Dari table diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 penyerapan anggaran Program/ Kegiatan sangat bervariasi. Untuk persentase serapan Kegiatan yang tertinggi yaitu Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan serapan 99,57% dan untuk serapan terendah yaitu Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar 4,36%. Untuk serapan Program yang tertinggi yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan serapan 98,79% dan untuk serapan terendah yaitu Program

Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Program Penatagunaan Tanah sebesar 4,36%.

C. Inovasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal memiliki beberapa inovasi yang telah diterapkan di tahun 2024 yaitu :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menuju Citra Manis (Cepat, Informatif, Transparan, Nyaman dan Ekonomis).

Demi mendukung tercapainya kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal dilakukan Optimalisasi Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dengan implementasinya meliputi 5 (lima) aspek utama yaitu :

- pembentukan forum kolaborasi PBG;
- jaringan dan koneksi social
- penyusunan regulasi PBG
- optimalisasi digitalisasi proses PBG, dan;
- program capacity building.

Gambar 3.1
Layanan Status Permohonan PBG

[←](#)
[↻](#)
[🔍](#)
[📄](#)
[🔖](#)
[🔗](#)
[🔧](#)

[https://dpupr.kendakab.go.id/pbg/](#)


DPUPE KENDAL

[Home](#)
[Informasi PBG/SLF](#)
[Manual Book](#)
[Publikasi](#)
[Tentang Kami](#)

Pencarian Progress Pengajuan PBG/SLF

Pencarian Data

Pencarian data dapat berdasarkan nomor pengajuan PBG/SLF

Pencarian:
[Cari!](#)

No Pengajuan	No Angkasan	Nama Pengajuan	Lokasi Pengajuan	Kemilik Pengajuan	Fungsi Pengajuan	Konstruksi	Status	Keterangan
1 2018/4.1700024.01	PBG-354106 1700024-01	REHABILITASI LANTAI DAS BANGUNAN	KANTORAN INSPEKSI KENDAL, JL. PANGAREMBI NO. 71, Desa Widyadarmas, Kecamatan, PADJ REKREASI, Jawa Tengah	PT LUKAJANIRI TIRU REKREASI	Fungsi Lantai	PT REKREASI TIRU REKREASI LAKSANA	Baru Konsultasi	Verifikasi "TAKUT" • Analisis 0 dari 7 • Status 0 dari 7 • Nilai 0 dari 1 Keterangan Tambahan: (Baru) (Konsultasi dan Konsultasi Teknik Lanjutan)

[Go to Desktop or Activate Windows](#)

Sumber : <https://dpupr.kendalkab.go.id/pbg/>

2. “SIPPINTAR” Sistem Pengendalian dan Pengawasan Interaktif Tata Ruang Kabupaten Kendal.

SIPPINTAR merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai fasilitas pengawasan dan pengendalian tata ruang secara lebih efisien dan transparan.

Melalui aplikasi SIPPINTAR, pengguna dapat melaporkan berbagai permasalahan terkait tata ruang, memantau perkembangan pengaduan, serta mendapatkan informasi mengenai dasar hukum yang berlaku. Tujuan aplikasi ini untuk mempermudah Masyarakat dalam menyampaikan aduan mengenai permasalahan tata ruang dan mendapatkan tanggapan yang cepat dan tepat dari pihak berwenang. Selain itu juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi serta memastikan tata ruang yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Gambar 3.2
Tampilan SIPPINTAR

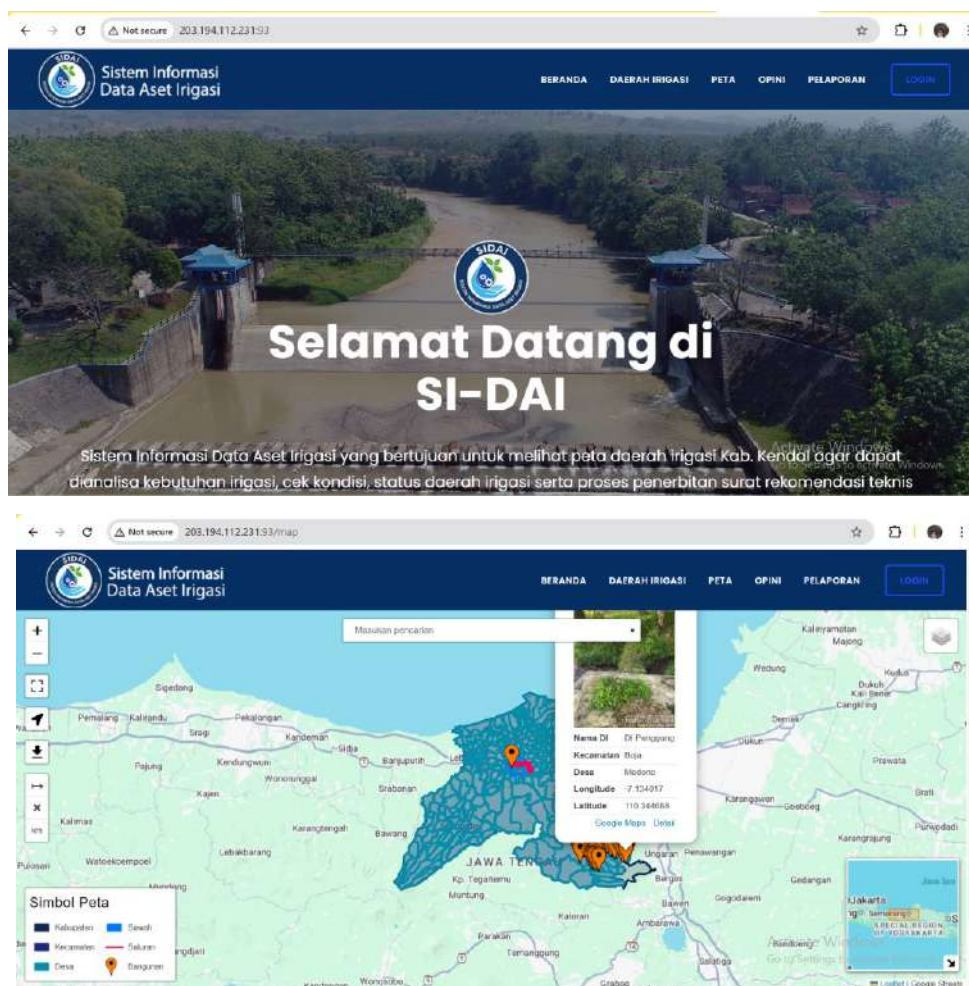


Sumber : <https://dpupr.kendalkab.go.id/sippintar/public/>

3. Sistem Informasi Data Aset Irigasi (SIDAI).

Sistem Informasi Data Aset Irigasi yang bertujuan untuk melihat peta daerah irigasi Kabupaten Kendal agar dapat dianalisa kebutuhan irigasi, cek kondisi, status daerah irigasi serta proses penerbitan surat rekomendasi teknis irigasi. Aset jaringan irigasi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, sehingga perlu terus didayagunakan melalui penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) secara baik dan benar. **Optimalisasi layanan irigasi berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian, stabilitas hasil panen, dan efisiensi penggunaan air. Hal ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani, pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan, serta pertumbuhan ekonomi daerah.**

Gambar 3.3
Tampilan SIDAI



Sumber : <http://203.194.112.231:93/>

D. Penghargaan

Gambar 3.4
Lomba Kinerja Petugas OP Jaringan Irigasi Tingkat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Kategori
Kemantren/Juru



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2023

Gambar 3.5
Penghargaan Kabupaten/Kota Terbaik Pelaksanaan DAK
Bidang Irigasi TA. 2023



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal disusun sebagai administrasi yang dapat memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin profesional, efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai evaluasi untuk meningkatkan mutu pengambilan keputusan, pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, baik bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dan pihak- pihak lain yang membutuhkan.

Dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, baik visi, misi, tujuan, sasaran, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan cara pencapaian tujuan setelah dilaksanakan evaluasi kinerja.

Secara umum hasil dari analisis capaian kinerja sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja sasaran baik yang tertuang pada Renstra 2021-2029 maupun Renstra 2025-2029 pada dasarnya sudah cukup baik mengingat beberapa indikator melampaui target yang telah ditetapkan, akan tetapi masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan penetapan target belum sepenuhnya relevan.
2. Untuk Indikator pada Renstra 2021-2026 masih terdapat beberapa indikator dengan kategori kurang yaitu persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota hal ini disebabkan oleh adanya banjir dengan skala dan dampak yang signifikan menyebabkan bertambahnya luas kawasan terdampak serta menurunnya tingkat perlindungan infrastruktur eksisting. Beberapa bangunan pengendali banjir mengalami kerusakan atau penurunan fungsi, sehingga cakupan kawasan yang terlindungi menjadi berkurang dibandingkan target yang telah direncanakan.

Untuk hambatan permasalahan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Adanya kebijakan efisiensi belanja yang mengharuskan penyesuaian alokasi anggaran, termasuk rasionalisasi belanja operasional dan belanja modal, sehingga beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal atau mengalami penundaan dari waktu yang telah direncanakan, baik dari perencanaan penganggaran maupun pada saat proses pengadaan barang/jasa;
- b. Proses Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga berpengaruh pada proses pelaksanaan lelang yang mundur dan waktu penyelesaian pekerjaan fisik yang terlalu mendekati akhir tahun;
- c. Adanya bencana banjir dengan skala dan dampak yang signifikan menyebabkan bertambahnya luas kawasan terdampak serta menurunnya tingkat perlindungan infrastruktur eksisting. Beberapa bangunan pengendali banjir mengalami kerusakan atau penurunan fungsi, sehingga cakupan kawasan yang terlindungi menjadi berkurang;
- d. Masih tingginya antrian proses verifikasi pengajuan, yang disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen permohonan yang diajukan. Sebagian pemohon mengajukan permohonan tanpa memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana ditetapkan, sehingga berkas tidak dapat langsung diproses dan memerlukan klarifikasi maupun perbaikan. Selain itu, pada saat dilakukan permintaan revisi dokumen, respon pemohon cenderung lambat, yang berdampak pada tertundanya proses verifikasi lanjutan dan memperpanjang waktu penyelesaian pelayanan;
- e. Masih terbatasnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang berminat mengikuti pelatihan tenaga terampil konstruksi. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman tenaga kerja terhadap manfaat pelatihan dan sertifikasi kompetensi, keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan harian;
- f. Terkait dengan perencanaan kegiatan fisik yang mengacu pada AHSP perlu menyesuaikan dengan adanya perubahan SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor : 182/SE/Dk/2025 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
- g. Terdapat paket pekerjaan yang mengalami gagal lelang;

- h. Kabupaten Kendal belum memiliki IPLT sehingga berdampak pada capaian kinerja akses sanitasi aman;
- i. Adanya pemanfaatan ruang di atas saluran drainase yang tidak sesuai peruntukan, sehingga menurunkan usia guna dan fungsi saluran drainase. Pembangunan bangunan permanen maupun semi permanen di atas saluran menghambat akses pemeliharaan, mengurangi kapasitas aliran, serta meningkatkan risiko kerusakan konstruksi dan genangan air pada saat curah hujan tinggi;
- j. Beberapa ruas jalan yang menggunakan perkerasan aspal mengalami kerusakan dini, hal ini disebabkan oleh adanya genangan air pada waktu hujan di ruas jalan yang memang belum memiliki saluran drainase ataupun drainase jalan tersebut tidak dapat berfungsi optimal;
- k. Masih terdapat ruas jalan yang perlu adanya peningkatan konstruksi namun belum dapat dikerjakan, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan pembagian anggaran berdasarkan skala prioritas;
- l. Masih terdapat kecamatan yang belum memiliki RDTR sehingga upaya dan implementasi kegiatan pengendalian dan pemanfaatan ruang belum optimal;
- m. Belum selesainya tahapan dalam proses pensertifikatan tanah Pemda yang mana dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu cukup panjang serta adanya ketergantungan dengan instansi lain yang membutuhkan waktu cukup lama.

Faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah:

- a. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029;
- b. Dalam menyikapi kebijakan efisiensi belanja dilakukan penajaman prioritas program dan kegiatan secara selektif dan terukur dan memfokuskan alokasi anggaran pada kegiatan yang bersifat wajib, mendukung pelayanan dasar, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama;

- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dengan mengirimkan menjadi peserta diklat teknis;
- d. Perlu pencermatan kembali dalam penentuan target pada beberapa kegiatan dan indikator kinerja dan besaran anggaran, sehingga tidak terjadi kembali capaian kinerja yang dibawah target perencanaan (sebaiknya berdasarkan baseline data capaian tahun sebelumnya);
- e. Kebutuhan akses pelayanan sanitasi semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal serta tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan akses sanitasi yang layak dan aman;
- f. Komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akses sanitasi yang tertuang juga dalam Standar Pelayanan Minimal;
- g. Koordinasi antara institusi, lembaga dan asosiasi jasa konstruksi;
- h. Pelaksanaan sertifikasi tenaga jasa konstruksi secara rutin. Penguatan sosialisasi, peningkatan aksesibilitas, dan penyesuaian waktu pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja konstruksi yang tidak bersamaan dengan waktu pekerjaan fisik dimulai (antara triwulan III-IV);
- i. Prioritas rekonstruksi/rehabilitasi jalan yang membutuhkan penanganan segera;
- j. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan peran saluran drainase sebagai prasarana pengendali genangan dan banjir, serta larangan pemanfaatan ruang di atas saluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi dan strategi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

- a. Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan <https://esr.menpan.go.id/> dengan tepat waktu.

Tindak lanjut : Mengunggah dokumen perencanaan dan laporan kinerja pada website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dan website <https://esr.menpan.go.id/> tepat waktu

- b. Dalam melaksanakan kegiatan penyesuaian anggaran, agar memprioritaskan pencapaian kinerja pada program/kegiatan yang belum tercapai kinerjanya
Tindak lanjut : Telah dilakukan langkah-langkah strategis berupa evaluasi capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan skala prioritas penyesuaian anggaran, dengan mengarahkan alokasi sumber daya pada program dan kegiatan yang memiliki tingkat capaian kinerja belum optimal namun berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis
- c. Dalam penyusunan rencana program/kegiatan agar menambahkan kegiatan/sub kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang belum tercapai.
Tindak lanjut : Telah dirumuskan kegiatan dan/atau subkegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian IKU yang belum optimal
- d. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang agar mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
Tindak lanjut : Menyusun Perjanjian Kinerja berjenjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yang mengacu pada ketentuan yang berlaku
- e. Agar menyusun SOP Pengumpulan Data.
Tindak lanjut : Menyusun SOP Pengumpulan Data
- f. Agar dalam menyusun dokumen Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan/kendala yang dihadapi disajikan secara spesifik, terutama terkait indikator kinerja yang belum tercapai.
Tindak lanjut : Menyusun dokumen LKJIP dengan menyajikan informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan/kendala yang dihadapi
- g. Agar menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku
Tindak lanjut : Menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya dan dijadikan pedoman perbaikan kinerja tahun mendatang

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk program kegiatan/kinerja yang akan datang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kendal



SUDARYANTO, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197007151999031004

KOREKSI SURAT		
PEJABAT	TGL	PARAF
1. Sekda		
2. Asisten		
3. Ka. Dinas		
4. Sekretaris		
5. Ka. Bidang	27/2/26	↑
6. Ka. Seksi/ Ka Subag/ Ka JPTD	27/2/26	↑

LAMPIRAN-LAMPIRAN

